

Tugas Individu

**TUGAS PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN *GOOD GOVERNANCE*
MENURUT PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL**

Disusun sebagai Pelaksanaan Tugas untuk:
Mata Kuliah: Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan

Dosen:
Dra. ANAH KUNYATI, M.Si

Oleh:
HERU SUNOTO
NRP: 13.01.003

**PROGRAM PASCASARJANA SPESIALIS-1 PEKERJAAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS)
BANDUNG
2014**

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ...

Alam semesta beserta isinya, sejak pertama kali diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa hingga kini semuanya stabil, seimbang, normal, dan berjalan sesuai *sunnah kauniyah*-nya. Keseimbangan alam selalu terjaga sehingga manusia bisa hidup dengan baik di bumi. Ini adalah karena *good governance* Tuhan. Tata kelola alam yang baik. Maha Suci Allah yang Maha Mengatur lagi Maha Bijaksana.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, seharusnya mampu menciptakan sistem kehidupan yang juga *good governance*. *Output*-nya adalah kesejahteraan sosial manusia dan menjaga keseimbangan alam yang sudah disediakan Tuhan. Manusia memiliki pikiran, perasaan, harapan, dan cita-cita. Ini semua tidak dimiliki oleh makhluk manapun. Namun, fakta justeru menggambarkan kepada kita bahwa manusialah biang kerusakan alam, biang penindasan kepada sesama manusia, sehingga hilanglah kata “kesejahteraan sosial” dari diri manusia. Kata “kesejahteraan sosial” hanya dimiliki oleh mereka yang berkuasa dan yang berduit.

Makalah ini penulis buat sebagai telaahan singkat. Semoga bermanfaat. Terakhir, kami berharap ada masukan dan penyempurnaan dari sesama teman-teman Sp-1, dan lebih khusus lagi dosen kami.

Bandung, April 2014

Heru Sunoto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PEMBAHASAN	2
Definisi Good Governance	
Peran Pemerintah	
Peran Swasta	
Perspektif Pekerjaan Sosial dalam Kajian Kemiskinan	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap jam 06.00 pagi matahari terbit dari ufuk timur, jam 12.00 tepat di atas kepala kita, dan jam 18.00 terbenam di ufuk barat. Setiap fajar pula ayam jantan *kukuluruk* atau *kukuruyuk* mengawali hari, burung berkicau di pepohonan, air laut mulai surut setelah pada malam hari pasang. Bila akan hujan, langit mendung, mulai gerimis, kemudian hujan. Pernahkah kita melihat matahari terbit jam 09.00 pagi? terbit dari ufuk selatan dan terbenam di ufuk utara? Pernahkah kita mengalami hujan yang tidak sesuai kebiasaannya, air hujan bukan jatuh dari atas tapi dari samping, air hujan tidak dingin tapi panas? Ayam jantan tidak ber-*kukuruyuk* di pagi hari, dan seterusnya?

Gambaran di atas adalah *good governance* yang dilakukan oleh Tuhan. Tidak bisa dibayangkan apabila Tuhan berbuat sesuka-Nya meskipun Dia mampu untuk itu. ini memberi pelajaran kepada kita akan pentingnya *good governance*.

Manusia sebagai makhluk sempurna yang diberi wewenang oleh Tuhan untuk memakmurkan bumi, seharusnya mampu menerapkan *good governance*. Konsep *tri parthide* Montesque bahwa manusia dalam hidup bersama menerapkan sistem negara; ada pembuat aturan; pelaksana aturan; dan pengawas. Tujuannya adalah agar semua sistem kenegaraan berjalan normal, tidak ada pemusatan kekuasaan. Karena kekuasaan yang terpusat berpeluang untuk terciptanya kezaliman. Dan kezaliman adalah *bad governance*.

Bagaimana *good governance*? Apa peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan *good governance*? Bagaimana perspektif pekerjaan sosial dalam Kajian Kemiskinan terkait *good governance*? Pertanyaan-pertanyaan ini yang hendak kita jawab melalui kajian ilmiah ini.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE MENURUT PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL

A. GOOD GOVERNANCE

1. Definisi

Istilah Good Governance (GG) atau yang diterjemahkan menjadi tata-kelola pemerintahan yang baik biasanya berkaitan dengan gaya manajemen yang demokratis, isu hak asasi manusia (HAM), dan beragam pelayanan publik. Good Governance juga erat kaitannya dengan manajemen pada sektor dunia usaha dan berbagai organisasi nirlaba yang berkiprah untuk pelayanan publik.

Eric Neumeyer (2005: 8) mendefinisikan GG sebagai berikut:

*Governance is defined as the way in which policy makers are empowered to make decisions, the way in which policy decisions are formulated and implemented and the extent to which governmental intervention is allowed to encroach into the rights of citizens. GG respects the political, civil and human rights of citizens, is in accordance with the rule of law, provides effective and non-corrupted public services to the people and utilises public resources in an accountable and transparent way and with the aim of promoting the general social welfare. (Tata-kelola pemerintahan didefinisikan sebagai cara dimana para pembuat kebijakan diberdayakan untuk membuat keputusan; cara dimana keputusan politik dirumuskan dan diimplementasikan dengan mengedepankan hak warga negara; GG menghargai aspek politik, aspek sipil dan HAM warga negara, searah dengan *rule of law*, memberikan pelayanan publik yang efektif dan tidak koruptif, pemanfaatan berbagai sumber secara akuntabel dan transparan, dan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan sosial secara luas).*

Berdasarkan definisi di atas, GG terkait dengan tata-kelola dalam pemerintahan, tentan cara membuat kebijakan, oleh siapa, dampaknya kepada publik, ditujukan agar pelayanan publik berjalan efektif, bebas korupsi, transparan, dan akuntabel.

Sarfraz Khawaja (2011:12) mendefinisikan GG sebagai berikut:

The concept of governance is concerned directly with the management of the development process, involving both the public and the private sectors. It encompasses the functioning and capability of the public sector, as well as the rules and institutions that create the framework for the conduct of both public and private business, including accountability for economic and financial performance, and regulatory frameworks relating to companies, corporations, and partnerships. (Konsep tentang tata-kelola pemerintahan secara langsung fokus pada manajemen proses pembangunan,

menyatunya sektor publik dan swasta; mencakup keberfungsian dan kapabilitas sektor publik; selaras dengan aturan dan institusi yang bisa mencipta kerangka kerja perilaku urusan publik maupun swasta, termasuk akuntabilitas performa ekonomi dan finansial, regulasi kerangka kerja terkait perusahaan dan kemitraan).

Berdasarkan definisi di atas, GG adalah berlaku untuk pemerintah, swasta, sektor publik, pemerintahan, perusahaan, ekonomi, dan hubungan kemitraan, sebagai proses manajemen pembangunan.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) (2007: 2) mendefinisikan *good governance defined as the exercise of authority through political and institutional processes that are transparent and accountable, and encourage public participation*. (GG didefinisikan sebagai mengimplementasikan otoritas melalui proses politik dan institusional secara transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi publik).

Definisi dari PBB ini menjelaskan bahwa GG adalah domainnya pemerintah sebagai penyelenggara negara, membuat kebijakan terkait arena publik, dilaksanakan melalui jalur politik dan institusi dengan membuka partisipasi masyarakat secara transparan dan akuntabel.

GG (www.goodgovernance.org.au) adalah tentang seperangkat proses untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan; GG bukan sekedar bagaimana membuat keputusan secara benar, melainkan bagaimana yang terbaik dari proses-proses yang mungkin bisa diambil untuk membuat keputusan tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, GG adalah bicara tentang proses dan hasil; proses yang melibatkan semua stakeholders dan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, responsif, efektif dan efisien, dan hasil yang optimal demi kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

2. Karakteristik *good governance*

GG mempersyaratkan sejumlah hal agar bisa terlaksana dengan baik. Bank Dunia dalam Sarfraz Khawaja (2011: 13) menyebutkan ada empat karakteristik dari GG, yaitu:

- *Public Sector Management* (Manajemen sektor publik)
- *Accountability* (Akuntabilitas)
- *Legal Framework for Development* (Kerangka kerja yang legal untuk pembangunan)
- *Transparency and information* (Transparansi dan informasi).

Menurut Asian Development Bank (ADB) dalam Sarfraz Khawaja (2011: 14), ada empat karakteristik dari GG, yaitu:

- *Accountability* (Akuntabilitas)
- *Participation* (Partisipasi)
- *Predictability* (Mampu diprediksi)
- *Transparency* (Keterbukaan)

Apabila kita rinci keempat karakteristik di atas, kita bisa gambarkan (Sarfraz Khawaja, 2011: 15) sebagai berikut:

KARAKTERISTIK	BIDANG GOOD GOVERNANCE
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen sektor publik ▪ Manajemen perusahaan publik ▪ Manajemen keuangan publik ▪ Reformasi layanan sipil
Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partisipasi penerima layanan dan kelompok yang terkena dampak ▪ Sektor publik atau swasta ▪ Desentralisasi fungsi layanan publik ▪ Kerjasama dengan NGO
Prediktabilitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum dan pembangunan ▪ Kerangka legal untuk pembangunan sektor swasta ▪ Aksesibilitas dan kualitas layanan ▪ Kemitraan publik dan swasta
Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transparansi informasi ▪ Kemudahan akses informasi ▪ Menghindari dis-informasi dan perkara hukum dengan media massa ▪ Reliabilitas/Keabsahan informasi.

Menurut the Local Government Act 1989, (www.goodgovernance.org.au) ada tujuh karakteristik GG, yaitu:

- *Accountable* (Akuntabel)
- *Transparent* (Transparansi/keterbukaan)
- *the rule of law* (Pemerintahan yang berdasarkan aturan/hukum)
- *Responsive* (Responsif)
- *Equitable and inclusive* (Pemerataan dan Menjangkau semua)

- *Effective and efficient* (Efektif dan Efisien)
- *Participatory* (Partisipasi).

Deepa Narayan (2002) menyatakan bahwa GG memiliki karakteristik yang sangat luas, namun ada tiga hal yang fundamental yaitu *rule of law*, *empowerment*, dan *anti-corruption*. Dengan *rule of law*, maka tercipta kepastian hukum, stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan yang tinggi; dengan *empowerment* maka potensi masyarakat bisa di-*explore* dengan maksimal untuk kesejahteraan serta terbukanya ruang partisipasi secara luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan mereka; dan anti-korupsi mengindikasikan adanya efektif dan efisien, transparansi dan akuntabilitas, serta perbaikan layanan sektor publik.

B. PERAN PEMERINTAH

Apabila mengacu kepada penjelasan dari PBB (UN: 2007), ada empat peran pemerintah di dalam pelaksanaan GG, yaitu:

- Strengthening democratic institutions (Penguatan lembaga-lembaga demokratis)
- Improving service delivery (Perbaikan layanan kepada masyarakat)
- The rule of law (Pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum)
- Combating corruption (Memerangi korupsi).

Keempat peran di atas dapat dilakukan dengan menggunakan karakteristik-karakteristik GG sebagaimana sudah kami kemukakan di atas.

Dalam GG, terdapat perubahan paradigma tentang pemerintah dan tata-kelola pemerintahan (UN, 2007: 5 - 6), yaitu:

- **Strategi inovasi pemerintah**, termasuk di dalamnya redefinisi peran pemerintah: reformasi regulasi, privatisasi dan *outsourcing*, pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja, manajemen SDM, manajemen finansial dan evaluasi kebijakan: memperluas ruang partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan melalui pembukaan jalur komunikasi, penguatan kemitraan dengan *civil society*, dan perubahan manajemen.
- **Kepercayaan kepada pemerintah dan etika pelayanan publik**, termasuk di dalamnya adalah mempromosikan etika pelayanan publik, mengurangi kolusi bisnis-negara, menekan korupsi melalui reformasi institusional, regulasi, dan memperbaiki sistem pengawasan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui akses informasi, transparansi manajemen SDM, akuntansi dan sistem lelang, verifikasi identitas pembuat kebijakan, perbaikan manajemen arsip nasional, prosedur online dalam sistem aplikasi pelayanan dan kontrol, serta membuat mekanisme Ombudsman.

- **Transparansi dan partisipasi e-government**, termasuk di dalamnya membuka ruang diskusi dalam perbaikan proses kerja melalui aplikasi teknologi informasi dan proses-proses administrasi, pembagian informasi dan manajemen sumber informasi yang terintegrasi, perbaikan sistem pelayanan publik melalui *online* dalam seluruh proses, peningkatan pelayanan berbasis elektronik.

C. PERAN SWASTA/DUNIA USAHA

Good corporate governance (UN, 2007: 58) mulai diterima dan diikuti oleh banyak perusahaan multi nasional sejak krisis Asia pada tahun 1997-1998. Globalisasi telah menyebabkan perubahan ekonomi di satu negara berdampak begitu cepat kepada negara lain.

Good Corporate Governance (GCG) dalam sebuah sistem yang kapitalistik (Zastrow, 2007) akan penyebab meningkatnya angka kemiskinan karena dua hal, yaitu:

- Upah buruh yang rendah
- Pengangguran yang semakin tinggi karena penggunaan teknologi tinggi yang memicu pengurangan tenaga kerja dengan jargon *cost-benefit analysis*.

Globalisasi juga (Jim Ife, 2008) menjadi penyebab negara kehilangan perannya sebagai penjamin kesejahteraan warganya. Hal ini karena dalam sistem globalisasi, para kapitalis hanya loyal dengan modal usahanya; ia akan memindahkan dan menanamkan modalnya di negara manapun yang “ramah” kepada kepentingannya. Maka, negara yang “kalah” adalah yang menjadi alat bagi para kapitalis untuk semakin memperkaya diri dan memperdaya segala sumber sebagai modalnya. Maka, negara harus kuat dan menjadi alat kontrol bagi seluruh kepentingan kapitalis untuk kesejahteraan rakyat.

Maka, untuk menghindari kemungkinan buruknya globalisasi dan kapitalisme di atas, sehingga ada GCG (UN, 2007: 59), pemerintah harus:

- Pertama, menggunakan *power* dan otoritasnya untuk membuat regulasi yang “memaksa” kalangan usaha mengikuti regulasi yang *pro-poor and effected groups*.
- Kedua, pemerintah bisa secara langsung berpartisipasi dalam urusan perusahaan sebagai stakeholders atau salah satu pemangku kepentingan.

D. PERAN CIVIL SOCIETY

Peran masyarakat (*civil society*) dalam GG adalah sangat strategis. Apabila digunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan mampu mengeliminasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. *Civil society* sebagai salah satu stakeholders pembangunan memiliki sejumlah peran strategis (Fredian Tonny Nasdian: 2014, hal 145 - 147), yaitu:

- Sebagai fasilitator
- Sebagai pendidik
- Sebagai utusan atau wakil dari beneficiaris

Banyak teknik yang bisa digunakan untuk bekerja bersama masyarakat dalam mendapatkan hak-hak sipilnya terhadap kekuasaan. Peran advokasi sangat penting apabila berkaitan dengan perjuangan hak-hak orang yang tertindas dan terkena dampak negatif kebijakan. Brager dkk (1987) dan sneider dkk (2001) dalam Netting (2004) menyebutkan ada tiga strategi civil society dalam bekerja bersama masyarakat, yaitu (i) kolaborasi, (ii) kampanye, dan (iii) kontes. Strategi kolaborasi digunakan apabila para stakeholder kooperatif, menyepakati perubahan dan pencapaian tujuan bersama; kampanye digunakan apabila secara umum semua agenda disepakati oleh para stakeholders namun ada sejumlah kendala yang harus diselaraskan dan sepehamkan; dan kampanye adalah strategi yang digunakan kepada pemilik kekuasaan yang menindas, tidak mau bekerja sama dan bersifat menentang perubahan.

E. PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL DALAM KAJIAN KEMISKINAN

Pekerjaan sosial adalah profesi yang menggunakan tiga pilar profesionalisme: knowledge, skills, and value untuk membantu keberfungsian sosial individu, kelompok, komunitas, masyarakat.

National Association of Social Workers (NASW) mendefinisikan pekerjaan sosial dalam Zastrow (2010: 5) sebagai berikut:

Social work is the professional activity of helping individual, group, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal condition favorable to their goals; Social work practice consist of the professional application of social work values, principles, and techniques to one or more of following ends: helping people obtain tangible services, providing counseling and psychotherapy for individuals, families, and group provide or improve social and health services, and participating in relevant legislative processes; The practice of social work requires knowledge of human development and behavior, of social, economic, and cultural institutions, and of the interaction of all these factors. (Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional dalam membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau mengembalikan aktivitas mereka sehingga berfungsi sosial kembali dan mencipta kondisi sosial yang mendukung pencapaian tujuan mereka; Praktik pekerjaan sosial terdiri atas aplikasi nilai, prinsip, dan teknik terhadap satu atau lebih tujuan akhir: membantu manusia untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan, penyediaan konseling dan psikoterapi

untuk individu, dan partisipasi di dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan yang sesuai; Praktik pekerjaan sosial mensyaratkan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia, ilmu sosial, ekonomi, dan institusi budaya, dan interaksi dari semua faktor tersebut).

Dari definisi pekerjaan sosial dari NASW di atas, kita mengetahui bahwa *core* pekerjaan sosial pada tiga domain kehidupan manusia, yaitu individu, kelompok, dan komunitas atau masyarakat; tujuannya peningkatan atau pemulihan keberfungsian sosial untuk kesejahteraan sosial.

Di dalam domain komunitas, maka pekerjaan sosial dalam sektor ini disebut pekerjaan sosial makro atau *macro practice social work*.

F. ELLEN NETTING dkk (2004) menyebutkan bahwa peran pekerjaan sosial dalam praktik makro adalah:

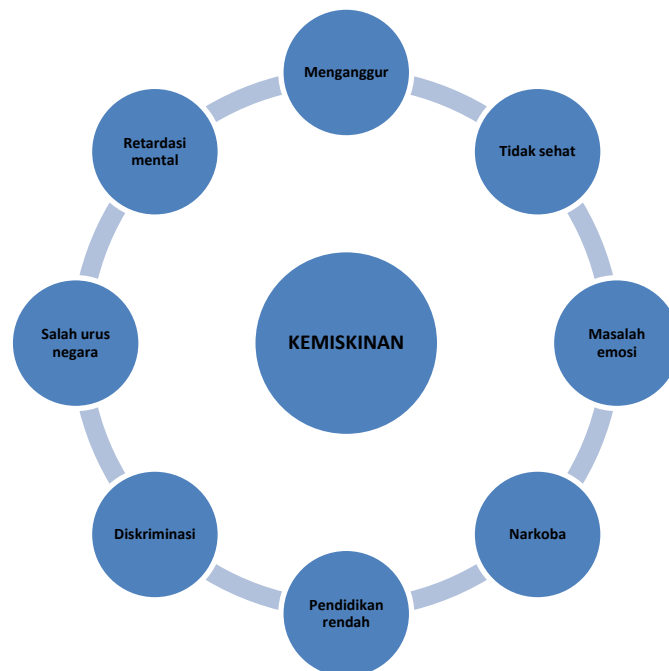
- *It's professionally guided intervention designed to bring about planned change in organizations and communities* (Merupakan petunjuk profesional dalam intervensi yang didesain untuk perubahan perencanaan organisasi dan masyarakat)
- *It's based on a variety of practice models* (merupakan satu jenis model praktik pekerjaan sosial);
- *Macro-level activities engage in organizational, community, and policy arenas* (aktivitas level makro berkiprah di organisasi, komunitas/masyarakat, dan kebijakan)
- *It's beyond individual interventions* (Melampaui intervensi individual).

Rotman, Erlich, dan Tropman dalam bukunya *Strategies of Community Intervention* (2001) dalam Netting (2004) menyebutkan bahwa praktik pekerjaan sosial makro masuk pada tiga domain, yaitu komunitas, organisasi, dan kelompok yang erat (*closed group*).

Netting (2004: 6 – 7) menjelaskan bahwa *Macro practice* adalah sebuah intervensi profesional, didasarkan pada kaidah pengetahuan, nilai etika, dan ketrampilan yang didesain untuk perubahan kebijakan pada organisasi dan komunitas. *Output*-nya adalah pengembangan teori baru dan pembuatan kebijakan untuk ranah publik.

Perspektif kajian kemiskinan melihat GG sebagai suatu modal sosial untuk tercapainya keberfungsian sosial masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan sosial masyarakat luas. John Field (2008: 1 - 12) menyebutkan ada tiga poin utama modal sosial, yaitu kepercayaan, norma, dan jejaring. Apabila tiga pilar modal sosial ini bagus maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat.

Zastrow (2007) menyebutkan bahwa kemiskinan yang terjadi selama ini disebabkan oleh delapan faktor, yaitu sebagaimana tergambar di bawah ini:



Oscar Lewis dalam *the Culture of Poverty* (1966) menyebutkan bahwa kemiskinan yang selama ini ada lebih banyak terjadi karena kemiskinan struktural, atau salah urus negara dalam bahasanya Zastrow. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan partisipatif sebagai paradigma baru pembangunan sehingga mampu mensejahterakan.

John W. Vincet II dalam Ronda Phillip (2009: 60) menyatakan ada delapan alasan mengapa partisipasi masyarakat adalah keharusan dan merupakan faktor penting dalam *Community Development*.

- 1) Masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam keputusan yang akan berdampak kepada kehidupan mereka;
- 2) Masyarakat memiliki hak menentukan warna dan model masyarakat yang mereka inginkan;
- 3) Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang keputusan, menerima atau menolak atau bahkan mengubah keputusan yang dibuat oleh pihak lain terkait dengan masyarakatnya;
- 4) Demokrasi partisipasi adalah metode terbaik yang bisa menyambungkan kepentingan masyarakat bersama;

- 5) Memaksimalkan interaksi sosial di dalam masyarakat akan mampu mendongkrak potensi untuk perkembangan yang positif;
- 6) Menciptakan dialog dan interaksi dalam masyarakat akan mampu memotivasi warga untuk ikut andil dalam kegiatan kemasyarakatan;
- 7) Merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap proses dan komitmen untuk ikut terjun dalam kegiatan dibuat ketika warga mau membuat perencanaan strategi pembangunan kemasyarakatan;
- 8) Fokus *Community Development* adalah mendongkrak dan menyertakan kemampuan masyarakat untuk secara independen dan efektif bisa menyelesaikan isu-isu kritis dalam masyarakat.

Jim Ife (2002: 211 – 216) menyebutkan bahwa menghargai lokal adalah salah satu pilar penting paradigma baru dalam pembangunan. Ada lima pilar tentang menghargai lokal, yaitu:

- Menghargai pengetahuan lokal
- Menghargai sumber daya lokal
- Menghargai budaya lokal
- Menghargai ketrampilan lokal
- Menghargai proses lokal

Deepa Narayan (2002) menyebutkan bahwa *empowerment* dalam bingkai partisipatif akan mampu menguatkan *good governance*. *Empowerment* dan GG adalah dua hal yang hubungannya resiprokal; *Empowerment* yang baik akan meningkatkan GG, dan sebaliknya GG akan mampu meningkatkan *empowerment*.

Berdasarkan penjelasan di atas, perspektif pekerjaan sosial dengan kemiskinan melihat bahwa kemiskinan sebagai output dari *Bad Governance* (tata kelola pemerintahan yang buruk) terjadi karena salah urus negara, kebijakan pembangunan yang *top-down*, tidak *bottom-up*, dan meniadakan aspek partisipasi masyarakat (*civil society*) serta membuang kearifan lokal dalam seluruh tahapan pengambilan kebijakan dan implementasinya.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut:

Good governance (GG) adalah berfokus bukan pada bagaimana menghasilkan kebijakan yang benar, melainkan pada bagaimana seluruh proses pengambilan kebijakan, siapa yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana implementasinya dalam pembangunan melibatkan seluas-luasnya peran partisipasi seluruh stakeholders.

GG memiliki banyak karakteristik. Para ahli melihat secara berbeda tentang berapa jumlah karakteristik GG. Namun, kesimpulan dari karakteristik GG adalah tiga hal, yaitu (i) *Rule of Law*, (ii) *Empowerment*, dan (iii) *Anti-Corruption*. Dari ketiga karakteristik kunci ini lahir beragam karakteristik lainnya, semisal efektif dan efisien, resposibilitas, akuntabilitas, transparansi, tidak menindas (anti-oppressive), dan lain-lain.

GG akan dapat dicapai dan terus ditingkatkan apabila peran para stakeholders dirasakan nyata adanya. Perlu peran secara lebih kuat dari para stakeholders untuk *encourage* GG. Pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik harus beritikad baik untuk mau terus meningkatkan peran dan tugasnya; civil society harus terlibat dalam seluruh tahapan pengambilan keputusan, termasuk monitoring dan evaluasinya; dan masyarakat penerima layanan juga dilibatkan dalam proses-proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Field, John** (2008), *Social Capital*, 2nd Ed., Roudledge, Canada, USA, 2008.
- Fredian Tonny Nasdian** (2014), *Pengembangan Masyarakat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ife, Jim** (2008), *Human Right and Social Work: Toward Right-Based Practice*”, Cambridge Univercity Press, NY., USA.
- Ife, Jim** (2002), *Community Development: Community-based alternatives in an age of globalization*, 2nd Ed., Longman Pearson Education Australia, NSW, Australia
- Khawaja, Sarfraz** (2011), *Good Governance and Result-Based Monitoring*, Published by Poorab Academy, Islamabad, Pakistan.
- Narayan, Deepa (editor)** (2002), *Empowerment and Poverty Reduction: a Sourcebook*, World Bank, Washington DC., USA.
- Netting, Ellen F. et.al.** (2004), *Social Work Macro Practice*, 3th Ed., Allyn and Bacon, USA.
- Neumayer, Eric** (2005), *The Pattern of Aid Giving The impact of good governance on development assistance*, Roudledge, New York, USA.
- Phillips, Ronda and Pitmann, Robert** (editor) (2009), *An Introduction to Community Development*, , 1st Ed., Roudledge, Canada, USA.
- United Nation** (2007), *Good Governance Practices for theh Protection of Human Rights*, New York and Geneva.
- United Nation** (2007), *Towards Participatory and Transparent Governance: Reinventing Government*, New York, USA.
- Zastrow, Ch. and Ashman, KK Karen** (2007), *Understanding Human Behavior and the Social Environment*, 7th Ed., Thomson Brook/Cole, California, USA.
- Zastrow, Ch.** (2010), *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*, International Edition, 10th Ed., Brooks/Cole, Canada, USA.

<http://www.goodgovernance.org.au/about-good-governance/what-is-good-governance/>
downloaded at April 16th 2014
